

Latar Belakang

Dalam menghadapi persaingan bisnis, salah satu hal fundamental yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah permodalan. Pihak perusahaan harus memberikan perhatian penuh dalam masalah penyediaan dana. Penyediaan dana dapat berasal dari sumber internal yang meliputi laba ditahan dan sumber eksternal meliputi utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan modal saham. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memenuhi dananya dengan mengutamakan sumber dana yang berasal dari dalam. Namun, pertumbuhan perusahaan mengakibatkan kebutuhan dana juga semakin besar, sehingga dalam memenuhi sumber dana tersebut, perusahaan dapat menggunakan sumber dana dari luar perusahaan yaitu utang. Akan tetapi dalam penggunaan utang ini perlu adanya perhatian atas resiko yang diakibatkan dari penggunaan utang tersebut. Hal ini disebabkan penggunaan utang memiliki resiko yang tinggi, salah satunya yaitu beban bunga. Peningkatan utang akan secara langsung meningkatkan beban bunga untuk perusahaan sehingga perusahaan harus mampu menutupi beban tersebut melalui laba operasi yang didapatkan. Beban bunga yang besar akan mengurangi laba operasi yang ada dan mengakibatkan penurunan pada laba bersih. Sebaliknya, jika beban bunga kecil pengaruhnya terhadap laba pun kecil. Oleh karena, itu penggunaan modal sendiri ataupun modal asing sudah tentu harus memperhatikan kondisi perusahaan. Analisis terhadap pinjaman yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 2 pinjaman tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan atau sebaliknya memberikan kerugian. Menurut Soemarso (2005:79), salah satu sumber dana yang berasal dari pinjaman atau utang adalah peminjaman dana dari induk perusahaan atau perusahaan afiliasi yang dikenal dengan istilah utang afiliasi. Utang afiliasi dapat berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi peminjaman dana dari induk perusahaan atau perusahaan afiliasi merupakan salah satu contoh transaksi pihak-pihak yang berelasi. Transaksi pihak-pihak berelasi dewasa ini mendapat perhatian yang sangat serius baik dari dalam kalangan dunia bisnis maupun dari pihak otoritas perpajakan. Hal ini dikarenakan, pihak-pihak yang berelasi dapat menyepakati transaksi dimana pihak-pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukannya. Selain itu, transaksi pihak-pihak berelasi mungkin tidak dilakukan dalam jumlah yang sama dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seperti pada utang afiliasi yang memungkinkan suatu perusahaan membayar utang lewat dari jatuh temponya serta jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang disepakati. Hal ini dikarenakan belum ada aturan yang mengikat tentang saldo transaksi dan penyelesaian utang afiliasi. Sehingga hubungan berelasi dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. IAI (2012:7.2) menyatakan pada dasarnya transaksi antara pihak-pihak berelasi adalah “suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga 3 diperhitungkan”. Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diatur dalam PSAK No. 7 tahun 1994: Pengungkapan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, yang telah direvisi berdasarkan PSAK No. 7 tahun 2010: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Dalam revisi ini terdapat sejumlah aturan tambahan seperti pengungkapan lebih jelas mengenai saldo transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa serta syarat dan kondisinya. PT Sunu Network Broadcast Televisi adalah salah satu perusahaan yang memiliki utang afiliasi. Perusahaan yang bergerak di bidang media pertelevisian ini memiliki usaha

yang bernama Celebes TV, yaitu salah satu siaran televisi lokal yang ada di Makassar. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Bosowa Corporation sebagai perusahaan induk (holding company). Pada awal pendiriannya, perusahaan ini memerlukan sejumlah dana yang besar sehingga perusahaan ini melakukan peminjaman kepada perusahaan afiliasi yang tergabung dalam Bosowa Corporation. Hal ini dikarenakan perusahaan ini belum memiliki aset, sehingga tidak memungkinkan untuk meminjam kepada pihak luar. Selain itu, ada anjuran dari para manajemen, agar perusahaan ini melakukan peminjaman dana ke sesama perusahaan afiliasi di Bosowa Corporation. Salah satu transaksi yang dilakukan yaitu peminjaman dana kepada PT Semen Bosowa Maros. Berdasarkan PSAK No. 7 tahun 2010, PT Sunu Network Broadcast Televisi diharuskan mengungkapkan dengan jelas mengenai transaksi dengan pihak berelasi termasuk peminjaman dana yang telah disebutkan di atas. Hal ini dikarenakan setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi harus diungkapkan secara detail seperti hubungan istimewa bila terdapat pengendalian 4 (misalnya, hubungan induk perusahaan-anak perusahaan), walaupun tidak terdapat transaksi antara pihak berelasi tersebut. Selain itu perusahaan juga diharuskan untuk mengungkapkan jumlah transaksi beserta syarat dan kondisinya serta mengungkapkan kompensasi yang diberikan kepada anggota manajemen kunci seperti manajer, direksi, dan komisaris perusahaan. Dengan demikian, saldo transaksi dan penyelesaian liabilitas utang afiliasi menjadi lebih jelas sehingga tidak memungkinkan suatu perusahaan membayar utangnya lewat dari jatuh temponya dan jumlah yang dibayarkan juga sesuai yang disepakati. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN UTANG AFILIASI BERDASARKAN PSAK NO. 7 (2010) PADA PT SUNU NETWORK BROADCAST TELEVISI ”

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Secara umum perusahaan telah menyediakan laporan keuangan berdasarkan aturan yang berlaku khususnya PSAK No. 7 (2010). Mulai dari tahun 2012 sampai 2014, perusahaan secara konsisten menerapkan aturan PSAK No. 7 tahun 2010. 2. Pengukuran utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi telah sesuai dengan PSAK yaitu berdasarkan penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi dengan induk perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. 3. Pengakuan utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi sudah sesuai dengan PSAK yang diterapkan bahwa kewajiban diakui pada saat terjadinya. Utang afiliasi perusahaan diakui dan dicatat pada tanggal transaksi. 4. Penilaian utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi yaitu berdasarkan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. 5. Penyajian utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi sudah sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Utang afiliasi disajikan secara terpisah menurut jatuh temponya yaitu utang usaha pihak 49 berelasi dan utang jangka panjang pihak berelasi serta dipisahkan antara utang pihak ketiga, utang afiliasi pihak berelasi dan utang pemegang saham. 6. Pengungkapan utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi sudah sebagian besar diungkapkan sesuai dengan aturan PSAK No. 7 (2010) tentang transaksi pihak berelasi. Perusahaan

belum mengungkapkan dalam laporan keuangan mengenai syarat dan kondisi dari transaksi pihak berelasi serta penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak lain